



KOMDIGI

RENJA

RENCANA KERJA

2025

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

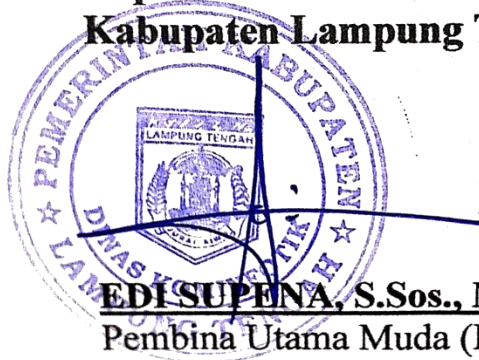
KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan merupakan sebuah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dan penjabaran dari ditetapkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Lampung Tengah dan hasil evaluasi program kegiatan pada tahun berjalan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak dijumpai kekurangan disana sini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan pada masa mendatang. Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2025 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Tengah

**Kepala Dinas Kominfotik
Kabupaten Lampung Tengah**



EDI SUPENA, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197501112000031009

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
RENCANA KERJA	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I	10
PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2. Landasan Hukum	13
1.3. Maksud dan Tujuan	15
1.4. Sistematika Penulisan	16
BAB II	17
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	17
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	30
BAB III	38
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	38
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2 Program dan Kegiatan	40
BAB IV	52
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	52
BAB V	61
PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 - REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2025	14
TABEL 2.2 - PROGRAM / KEGIATAN YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KINERJA YANG DIRENCANAKAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT	22
TABEL 2.3 - PROGRAM / KEGIATAN YANG MEMENUHI TARGET KINERJA YANG DIRENCANAKAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN.....	22
TABEL 2.4 - PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	24
TABEL 2.5 - PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI SELAMA TAHUN 2022	27
TABEL 2.6 - PELUANG DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI SELAMA TAHUN 2022	27
TABEL 2.7 - REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.....	30
TABEL 3.1 - RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	45
TABEL 4.1 - RUMUSAN RENCANA PROGRAM DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2025.....	51



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK**

Jln. Raya Padang Ratu No. 01, Telp (0725) 528990 Fax: 528990 Gunung Sugih

Email: Kominfotiklampungtengah@gmail.com Kode Pos: 34161

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR : 800/ /D.A.VI.15/2025 TENTANG RENCANA KERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK**

- Menimbang : A Bahwa Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-Opd) Memuat Arah Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah Selama Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun;
- B Bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Disusun Untuk Memberikan Kepastian Kebijakan Dalam Melaksanakan Program Dan Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang- Undang;
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Berakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Diatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintahan Daerah;
- 8 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016-2021;
- 9 Peraturan Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- 10 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- 11 Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah
- Kesatu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
- Kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kesatu Yang Selanjutnya Disebut Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Merupakan Penjabaran Rpjmd Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026;
- Ketiga Renstra Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021-2026 Sebagaimana Dimaksud Pada Diktum Kedua Menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2021-2026;
- Keempat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan, Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Keputusan Ini Maka Akan Diadakan Perubahan Dan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

**Kepala Dinas Kominfotik
Kabupaten Lampung Tengah**



EDI SUPENA, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197501112000031009

Tembusan :

1. Bupati Lampung Tengah (Sebagai Laporan)
2. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Lampung Tengah.
4. Arsip.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

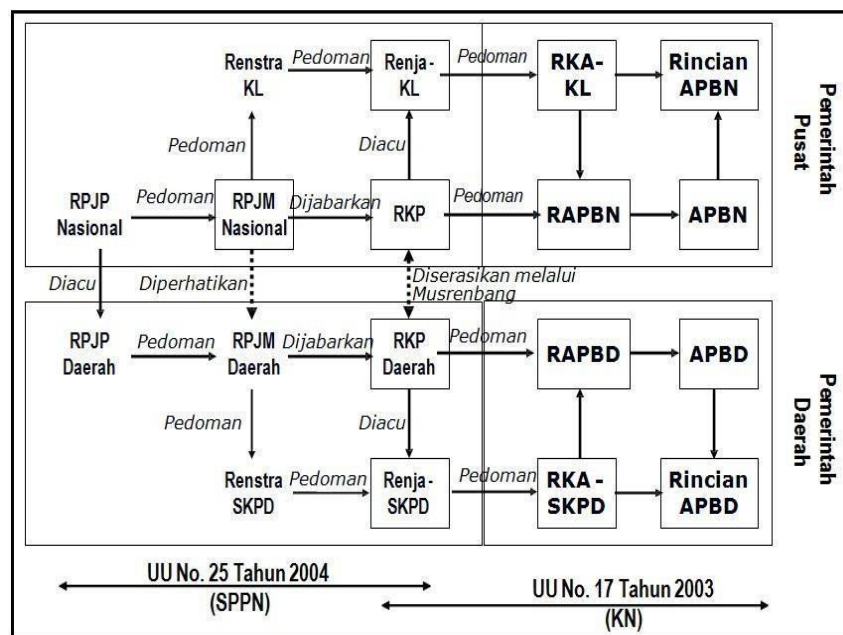
Berlakunya peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja perubahan pemerintah daerah mengamanatkan bahwa perangkat daerah menyusun renstra perangkat daerah dan renja perangkat daerah.

Rencana kerja perubahan perangkat daerah (renja pd) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja pd memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja pd disusun mengacu pada rencana strategis (renstra) pd, rencana kerja perubahan pembangunan daerah (rkpd), serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, renja dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan,
2. Penyusunan Rancangan Awal,
3. Penyusunan Rancangan,
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Akhir, Dan
6. Penetapan.

Renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rka perangkat daerah. Proses penyusunan renja perangkat daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan rkpd. Secara lebih rinci, hubungan renja perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja Pada Tahun 2025 Ini Adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Tengah)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

1.1 Maksud Dan Tujuan

Rencana kerja perubahan tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun pada dinas komunikasi informatika dan statistik. Adapun tujuan disusunnya renja tahun 2025 dinas komunikasi informatika dan statistik adalah menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah terkini sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025 yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan renja dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rkpd
- 2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program Dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dinas komunikasi informatika dan statistik didasarkan pada rencana strategis dinas komunikasi informatika dan statistik kabupaten lampung tengah tahun 2021-2026, dan perkiraan capaian renja perangkat daerah tahun 2025. Evaluasi tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi dpa perangkat daerah yang mencakup program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan renja dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan renja dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan renja dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renstra dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten lampung tengah tahun 2025.

Pelaksanaan renja perangkat daerah tahun 2024 dinas komunikasi informatika dan statistik terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 18 sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar rp.8.574.583.786 dan terserap sebesar rp 8.069.339.517,57 (97,32 %). Adapun rincin penyerapan perkegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1) Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

A. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Pagu Anggaran: Rp. 11.600.000,- (100%)

Penyerapan: Rp. 10.780.00,- (92,93%)

B. Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd

Pagu Anggaran: Rp. 18.250.000,- (100%)

Penyerapan: Rp. 17.360.000,- (95,12%)

C. Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan Dpa- Skpd

Pagu Anggaran: Rp. 14.964.000,- (100%)

Penyerapan: Rp. 13.691.200,- (91,49%)

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

A. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn

Pagu Anggaran: Rp. 1.212.665.000,- (100%)

Penyerapan: Rp. 1.210.430.000,- (99,82%)

B. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd

Pagu Anggaran: Rp. 9.000.000,- (100%)

Penyerapan: Rp. 8.170.000,- (90,78%)

C. Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Skpd

Pagu Anggaran: Rp. 21.570.000,- (100%)

Penyerapan: Rp 20.456.800,- (94,84%)

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

A. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Pagu Anggaran: Rp.32.196.300,- (100%)

Penyerapan: Rp. 30.811.756,- (95,70%)

B. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pagu Anggaran: Rp. 27.549.200,- (100%)

Penyerapan: Rp. 27.072.400,- (98,27%)

C. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Pagu Anggaran: Rp. 15.945.000,- (100%)

Penyerapan : Rp. 15.217.000,- (95,43 %)

D. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd

Pagu Anggaran : Rp. 88.521.000,- (100%)

Penyerapan: Rp 82.000.000,- (92,63%)

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Pagu Anggaran : Rp 68.400.000,- (100%)

Penyerapan : Rp 57.569.978- (84,17%)

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pagu Anggaran : Rp. 188.350.000,- (100%)

Penyerapan : Rp. 188.245.000,- (99,94 %)

B. Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya

Pagu Anggaran : Rp. 68.300.000,- (100%)

Penyerapan : Rp. 68.022.715,- (99,59 %)

C. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Pagu Anggaran : Rp. 21.186.000,- (100%)

Penyerapan: Rp. 20.790.880,- (98,13%)

6) Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Pagu Anggaran:Rp. 173.000.000(100%)

Penyerapan: Rp.168.328.200,- (97,30%)

B. Layanan Hubungan Media

Pagu Anggaran: Rp. 1.716.000.000,- (100%)

Penyerapan : Rp. 1.614.050.000,- (94,06 %)

C. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas

Pagu Anggaran : Rp 40.000.000,- (100%)

Penyerapan : Rp 36.070.473,- (90,18%)

7) Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

A. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah

Pagu Anggaran : Rp 1.565.784.047,- (100%)

Penyerapan : Rp 1.564.448.250,- (99,91%)

8) Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pagu Anggaran : Rp 1.914.000.000,- (100%)

Penyerapa : Rp 1.914.000.000,- (100%)

9) Penyelenggaraan Statistik Sektoral

A. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

Pagu Anggaran: Rp 40.000.000,- (100%)

Penyerapan : Rp 36.852.300,- (92,13%)

TABEL 2.1 /T.C- 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2024
NAMA PERANGKAT DAERAH: DINAS KOMUNIKASI INFO RMATIKA DAN STATISTIK

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHDAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2021-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAMDAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGETRENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	REALISASIRENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASICAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1			2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	16				URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
210	01	02	07		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT									
210	01	01	01	02	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	TERSEDIAANYA DOKUMEN RKA	5	1	1	1	100%	1	3	50%
210	01	01	01	06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASIKINERJA SKPD	TERSEDIAANYA DOKUMEN LAPORAN	60	12	12	12	100%	12	36	50%
210	01	01	02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH									
210	01	01	02	02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGASASN	TERSEDIAANYA PELAKSANAAN TUGASASN	130	26	26	26	100%	26	78	50%
210	01	05			KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	TERSEDIAANYA DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN	5	1	1	1	100%	1	3	50%
210	01	01	05	02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	TERSEDIAANYA PAKAIAN DINAS	100%	-	-	-	-	-	-	0%
210	01	01	05	09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	TERSEDIAANYA PELATIHAN PEGAWAI	100%	-	-	-	-	-	-	0%
10	01	01	06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH									
210	01	01	06	03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	TERSEDIAANYA PERALATAN RUMAH TANGGA	60	12	12	12	100%	12	36	50%
210	01	01	06	04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	TERSEDIAANYA LOGISTIK	125	25	25	25	100%	25	75	50%
210	01	01	06	05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	TERSEDIAANYA BARANG CETAKAN	135	27	27	27	100%	27	81	50%

210	01	01	17	01	PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN E-GOVERNMENT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA SPBE	230	46	46	46	100%	46	138	50%
210	01	01	17	03	PENGLOLAAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	TERLAKSANANYA PUSAT DATA	230	46	46	46	100%	46	138	50%
210	01	01	17	07	PENGEMBANGAN APLIKASI DAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASISELEKTRONIK	TERSARDIANYA APLIKASI	230	46	46	46	100%	46	138	50%
210	01	01	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA									
210	01	01	15	01	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, ANALISIS DAN DISEMINASI DATA STATISTIK SEKTORAL	TERSEDIANYA DATA SEKTORAL	230	46	46	46	100%	46	138	50%
210	01	01	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA									
210	01	01	15	12	PELAKSANAAN ANALISIS KEBUTUHAN DAN PENGLOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	TERLAKSANANYA PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH	230	46	46	46	100%	46	138	50%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap renja dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2024 pada tabel 2.1 kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2
Program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor- faktor penghambat

No	Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Kurangnya Informasi dan Keterbatasan Anggaran
2	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
3	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	
4	Pelayanan Informasi Publik	
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	
6	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk Dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	
7	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	

Sedangkan kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel 2.3 berikut

Tabel 2.3
Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perencanaan Penganggaran Yang Tepat Serta Di Dukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Sesuai Dengan Bidanganya.
2	Pengadaan Barang Milik Penyediaan Jasa Penunjang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	
3	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah	

Dari faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada tabel 2.2 dan tabel 2.3, maka kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran pada tahun 2024 yang perlu diupayakan sehingga seluruh indikator kinerja program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Pengelolaan Informasi Publik
2. Terlaksananya Smat City
3. Terlaksananya Layanan Informasi Publik
4. Terlaksananya Satu Data Indonesia
5. Terlaksananya Keamanan Informasi Publik
6. Nilai Sakip Kominfortik

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan perangkat daerah disampaikan iku (indikator kinerja utama), diambilkan dari target renstra dan pencapaian kinerja pelayanan pada 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat, yang terangkum dalam pencapaian kinerja pelayanan dinas komunikasi informatika dan statistik kabupaten lampung tengah sebagaimana terlihat pada tabel 2.4 berikut ini:

TABEL 2.4/T.C-30

PENCAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	REALISASI CAPAIAN KINERJA					KONDISI AKHIR RPJMD (2026)	REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025		2022	2023	2025	2026	
1.	PERSENTASE KOMUNITAS MASYARAKAT/MITRA STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN YANG MENYEBARKAN INFORMASI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH KABUPATEN			60%	70%	80%	90%	95%	97%	100%	80%	90%	100%	
2.	PERSENTASE MITRA STRATEGIS PEMDA (MEDIA KOMUNITAS SEPRTIKIM DLL) TERMASUK MEDIA LOKAL YANG MELAKSANAKAN DISEMINASI INFORMASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS DAERAH			56%	62%	67%	73%	76%	80%	60%	67%	70%	90%	
3.	PERSENTASE LAYANAN SPBE (LAYANAN PUBLIK DAN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN) YANG MEMANFAATKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4.	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK			46%	54%	67%	93%	97%	100%	46%	47%	90%	97%	
5.	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK			46 PD	46 PD	46 PD	46 PD	46 PD	46 PD	46 PD	32 PD	32 PD	46 PD	

Pencapaian indikator kinerja dinas komunikasi dan informatika tahun 2024 yang disajikan pada tabel 2.4 dapat diketahui bahwa:

1. Indikator dinas komunikasi dan informatika yang tidak memenuhi target adalah:
Persentase realisasi program penunjang urusan pemerintahan daerah indikator tersebut tidak dapat memenuhi terjadi dikarenakan hal sebagai berikut:
 - a. Kurangnya Informasi Waktu pelaksanaan
 - b. Terbatasnya anggaran yang ada di perangkat daerah
2. Indikator dinas komunikasi informatika dan statistik yang dapat memenuhi target adalah:
 - a. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten
 - b. Persentase mitra strategis pemda (media komunitas seperti kim dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah
 - c. Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan peraturan menteri kominfo nomor 5 tahun 2015 tentang registrasi nama domain instansi penyelenggara negara
 - d. Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas komunikasi informatika dan statistik
 - e. Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun
 - f. Perencanaan pembangunan daerah
 - g. Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan berbasis elektronik dan non elektronik.

Indikator tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Komitmen dan kerja sama seluruh komponen asn dinas untuk senantiasa meningkatkan kinerja
2. Sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja

Oleh karena itu, berdasarkan penilaian terhadap capaian indikator dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah yang perlu dilakukan pada tahun 2025 supaya seluruh indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Perlunya komitmen dan kerjasama seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja.
2. Perlu adanya asn yang memiliki kompetensi bidang statistik sesuai dengan keahliannya, untuk mewujudkan satu data indonesia.
3. Perlu adanya dukungan dari perangkat daerah untuk meningkatkan nilai indeks spbe dan satu data indonesia.

Berbagai upaya terus dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan dalam rpjmd kabupaten lampung tengah. Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai kendala dan hambatan baik yang bersumber dari intern maupun dari luar dinas.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi diantaranya adalah:

1. Minimnya infrastruktur dan sumber daya manusia di bidang statistik
2. Belum adanya portal untuk satu data indonesia
3. Belum optimalnya dukungan perangkat daerah untuk meningkatkan nilai indeks SPBE

Tabel 2.5
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi selama tahun 2023

Permasalahan	Hambatan
Terbatasnya SDM/ jumlah	Tidak ada tambahan ASN
Belum ada portal satu data Indonesia	Perubahan peraturan daerah kabupaten lampung tengah nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat daerah kabupaten Lampung Tengah
Nilai indeks SPBE	Kurang optimalnya dukungan perangkat daerah

Selain itu, selama tahun 2024, dinas komunikasi informatika dan statistik jugamenghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6
Peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2023

Peluang	Tantangan
Publikasi tentang potensi dan hasil pembangunan yang ada di kabupaten lampung tengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui informasi yang di terima masyarakat dapat mengetahui potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.	Beberapa wilayah di kabupaten Lampung Tengah masih terdapat <i>blind spot</i> .
Satu data indonesia akan memudahkan masyarakat memperoleh informasi datadengan mudah dan akurat	Belum optimalnya portal kabupaten lampung tengah dengan pusat
Terwujudnya sistem pemerintahan Berbasis elektronik (spbe) di kabupaten lampung tengah	Belum optimalnya dukungan dari seluruh Perangkat daerah dan terbatasnya sarana dan prasarana.

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan dinas komunikasi informatika dan statistik pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya publikasi di berbagai bidang, baik potensi maupun hasil pembangunan
- b. Keakuratan data yang ada di kabupaten lampung tengah
- c. Meningkatkan nilai indeks spbe

Sedangkan isu-isu penting lainnya yang ada di dinas komunikasi informatika dan statistik adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan informasi publik dalam mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Pelaksanaan keterbukaan informasi pada perangkat daerah saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dapat dilakukan secara transparan. Sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Dinas komunikasi informatika dan statistik kabupaten lampung tengah selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perangkat daerah agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap perangkat daerah kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki perangkat daerah.
2. Pengelolaan satu data indonesia dan terintegrasi sebagai wujud kesatuan pemakaian data. Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi pemerintah daerah kabupaten lampung tengah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju,seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan Fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Maka sangat dibutuhkan data untuk mendukung peningkatan layanan publik kepada masyarakat. Perencanaan, penganggaran, investasi dan implementasi tik untuk mendukung pelayanan publik.
3. Sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai pendukung transformasi digital. Sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan amanat peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem pemerintah berbasis elektronik (spbe) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi spbe oleh kementerian pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi

2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Review terhadap rancangan awal rkpd kabupaten lampung tengah tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara rancangan awal rkpd kabupaten lampung Tengah tahun 2024 dengan hasil analisis kebutuhan dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025. Hasil review terhadap rancangan awal rkpd kabupaten lampung tengah tahun 2025 disajikan pada table 2.7 berikut.

TABEL 2.7/T.C-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Program penunjang Urusan pemerintah daerah Kabupaten/kota										
	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi kinerja pemerintah daerah										
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen rka-skpd	Gunung Sugih	Jumlah dokumen rka-skpd Dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen rka- Skpd	1	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen rka- skpd	Gunung Sugih		1	14.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja skpd	Gunung Sugih	Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	12	13.500.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisarrealisasi kinerja skpd	Gunung Sugih	Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja Skpd	12	15.650.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Koordinasi dan Penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd	Gunung Sugih	Jumlah dokumen perubahan Dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan dpa-Skpd	1	12.800.000	Koordinasi dan Penyusunan dokumen Perubahan dpa-skpd	Gunug Sugih	Jumlah dokumen Perubahan dpa-skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan dpa-skpd	1		
	Penyusunan dokumen Perencanaan	Gunung Sugih	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat daerah	8	18.750.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Gunug Sugih	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	8		
	Administrasi keuangan Perangkat daerah										
	Penyediaan gaji dan Tunjangan asn	Gunung Sugih	Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan asn	26	2.551.234.470	Penyediaan gaji Dan tunjanganasn	Gunung Sugih	Jumlah orang yang Menerima gaji dan tunjangan asn	1		
	Penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas asn	Gunung Sugih	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	11	583.068.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas asn	Gunung Sugih	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn	12	593.068.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan akhir tahunskpd	Gunung Sugih	Jumlah laporan keuangan Akhir tahun skpd dan laporanhasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1	9.300.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahunskpd	Gunung Sugih	Jumlah laporan keuangan Akhir tahun skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd	1	16.300.000	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd	Gunung Sugih	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ Semesteran skpd dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ semesteran	12	22.710.000	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteranskpd	Gunung Sugih	Jumlah laporan keuangan Bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd dan laporan koordinasi Penyusunan laporan Keuangan	8	32.710.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
			Skpd					Bulanan/triwulanan/semesteran skpd			
	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan pemeriksaan	Gunung Sugih	Jumlah dokumen bahan Tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	3	12.800.000	Pengelolaan dan Penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Gunung Sugih	Jumlah dokumen bahan Tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut Pemeriksaan	3		
	<i>Administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>										
	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Gunung Sugih	Jumlah dokumen pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	26	4.300.000	Pendataan dan Pengolahan administrasi kepegawaian	Gunung Sugih	Jumlah dokumen pendataan Dan pengolahan Administrasi kepegawaian	26		
	Pengadaan pakaian dinas Beserta atribut kelengkapannya	Gunung Sugih	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	26	30.000.000	Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Gunung Sugih	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	26		
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Gunung Sugih	Jumlah pegawai berdasarkan Tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	25.000.000	Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Gunung Sugih	Jumlah pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100	45.000.000	
	<i>Administrasi umum perangkat Daerah</i>										
	Penyediaan bahan logistik Kantor	Gunung Sugih	Jumlah paket bahan logistik Kantor yang disediakan	37	30.300.700	Penyediaan bahan Logistik kantor	Gunung Sugih	Jumlah paket bahan Logistik kantor yang disediakan	37	63.300.700	

[illegible]

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Gunung Sugih	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik yang disediaka	12	90.000.000	Penyediaan jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Gunung Sugih	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	90.000.000,	
	<i>Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>										
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Gunung Sugih	Tersedianya pemeliharaan Kendaraan dinas	5	245.470.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan	Gunung Sugih	Tersedianya pemeliharaan Kendaraan dinas	5	212.350.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunanlainnya	Gunung Sugih	Terpeliharanya sarana gedung	1	46.652.000	Pemeliharaan/rehabilita Si gedung kantor dan bangunan lainnya	Gunung Sugih	Terpeliharanya sarana Gedung	1	85.818.000,	
	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Gunung Sugih	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	20	89.650.000	Pemeliharaan peralatan Dan mesin lainnya	Gunung Sugih	Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	20	91.650.000	
	<i>Pengelolaan informasi dan Komunikasi publik</i>										
	Layanan hubungan media	Gunung Sugih	Terselenggaranya hubungan Media	425	2.283.400.000.500	Layanan hubungan Media	Gunung Sugih	Terselenggaranya hubungan Media	425	3.646.119.500	
	Kemitraan dengan pemangku Kepentingan	Gunung Sugih	Terselenggaranya bakohumas	43	62.400.000	Kemitraan dengan Pemangku kepentingan	Gunung Sugih	Terselenggaranya Bakohumas	43	0	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Penyelenggaraan hubungan Masyarakat, media dan kemitraan komunitas	Gunung Sugih	Terselenggaranya kegiatan Kelompok informasi masyarakat	311	88.527.500	Penyelenggaraan Hubungan masyarakat, media dan kemitraan Komunitas	Gunung Sugih	Terselenggaranya kegiatan Kelompok informasi masyarakat	311	258.978.100	
	Pengelolaan media komunikasi Publik	Gunung Sugih	Terkelolanya media komunikasi	28	13.100.000	Pengelolaan media Komunikasi publik	Gunung Sugih	Terkelolanya media Komunikasi	28	10.500.000	
	Pelayanan informasi publik	Gunung Sugih	Terselenggaranya pameran Tingkat provinsi	1	359.475.000	Pelayanan informasi Publik	Gunung Sugih	Terselenggaranya pameran Tingkat provinsi	1	431.061.000	
	Pengelolaan konten dan Perencanaan media komunikasi publik	Gunung Sugih	Tersedianya social media	5	18.077.000	Pengelolaan konten dan Perencanaan media komunikasi publik	Gunung Sugih	Tersedianya social media	5	35.000.000	
	Penguatan kapasitas sumber Daya komunikasi publik	Gunung Sugih	Terselenggaranya ppid	43	2.186.000	Penguatan kapasitas Sumber daya komunikasi publik	Gunung Sugih	Terselenggaranya ppid	43	10.186.000	
	Program pengelolaan aplikasi Informatika										
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	Gunung Sugih	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	43	54.000.000	Penatalaksanaan Dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Gunung -sugih	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah kabupaten/kota	43	59.000.000	
	Pengelolaan pusat data Pemerintahan daerah	Gunung Sugih	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	1	1,500.000.000		Gunung Sugih	Jumlah pusat data Pemerintahan daerah yang dikelola	1	2.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pengembangan aplikasi dan Proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Gunung Sugih	Tersedianya aplikasi	1	34.000.000	Pengembangan aplikasi Dan proses bisnis pemerintahan berbasis Elektronik	Gunung Sugih	Tersedianya aplikasi	1	39.000.000	
	Penyelenggaraan sistem Penghubung layanan pemerintah	Gunung Sugih	Jumlah layanan publik yang Terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah daerah	1	25.000.000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan Pemerintah	Gunung Sugih	Jumlah layanan publik Yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	1	30.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Gunung Sugih	Terlaksananya program inovasi Yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1	27.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas dan kota cerdas	Gunung Sugih	Terlaksananya program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city	1	30.000.000	
	Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Gunung Sugih	Terlaksananya pengembangan Dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1	25.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah daerah	Gunung Sugih	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	1	30.000.000	
	Pengelolaan government Chief information officer (gcio)	Gunung Sugih	Terlaksananya pengelolaan Government chief information officer (gcio)	1	15.000.000	Pengelolaan Government chief information officer (gcio)	Gunung Sugih	Terlaksananya pengelolaan Government chief information officer (gcio)	1	20.000.000	
	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan pengembangan ekosistem spbe	Gunung Sugih	Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan ekosistem spbe	43	17.500.000	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan	Gunung Sugih	Terlaksananya monitoring, Evaluasi dan pelaporan Pengembangan ekosistem spbe	43	20.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
						Ekosistem spbe					
	Penyelenggaraan statistik Sektoral										
	Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Gunung Sugih	Tersedianya statistik sektoral	43	74.288.00	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik sektoral	Gunung Sugih	Tersedianya statistik sektoral	43	54.288.000	
	Peningkatan kapasitas Sdm pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang Terintegrasi	Gunung Sugih							26	50.000.000	
	Membangun metadata Statistik sektoral	Gunung Sugih	Terbangunnya membangun Metadata statistik sektoral	1	53.000.000		Gunung Sugih	Terbangunnya membangun Metadata statistik sektoral	1	57.000.000	
	Peningkatan kapasitas Kelembagaan statistik sektoral	Gunung Sugih	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan statistik sektoral	43	28.500,000		Gunung Sugih	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan statistik sektoral	43	30.000.000	
	Pengembangan Infrastruktur	Gunung Sugih	Berkembangnya infrastruktur	43	42.000.000		Gunung Sugih	Berkembangnya infrastruktur	43	47.000.000	
	Penyelenggaraan Otorisasi statistik sektoral di daerah	Gunung Sugih	Terselenggaranya otorisasi statistik Sektoral di daerah	1			Gunung Sugih	Terselenggaranya otorisasi Statistik sektoral di daerah	1	25.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi					

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pelaksanaan analisis Kebutuhan dan Pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Gunung Sugih	Tercapainya pelaksanaan analisis Kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan	43	36.000.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota	Gunung Sugih	Tercapainya pelaksanaan analisis Kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan	43	46.000.000	
	Pelaksanaan keamanan Informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Gunung Sugih	Terlaksananya pengamanan Informasi pemereintah daerah	43	21.420.000	Pelaksanaan Keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota berbasis Elektronik dan non elektronik	Gunung Sugih	Terlaksananya pengamanan Informasi pemereintah daerah	43	25.000.000	
	Penyediaan layanan Keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Gunung Sugih	Terlaksananya keamanan Informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	43	17.540.000	Penyediaan Layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/kota	Gunung Sugih	Terlaksananya keamanan Informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	43	20.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
	Pelaksanaan analisis Kebutuhan dan Pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Gunung Sugih	Tersedianya layanan keamanan Informasi untuk perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota	43	13.750.000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi Pemerintah daerah Kabupaten/kota	Gunung Sugih	Tersedianya layanan Keamanan informasi untuk perangkat daerah di Tingkat kabupaten/kota	43	15.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Rpjmn tahun 2021-2026 merupakan tahapan yang akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional. Rpjmn tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi presiden joko widodo dan wakil presiden ma'ruf amin. Visi presiden dan wakil presiden tahun 2020-2025 yaitu "terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian dengan landasan gotong royong. Upaya untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh dengan 9 (sembilan) misi atau dikenal sebagai nawa cita kedua yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman padaseluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia

Arah kebijakan dan sinergi pembangunan dalam pemerintahan lima tahun kedepan sebagai agenda prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, agenda menitik beratkan pada peningkatan daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi berkelanjutan serta meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing ekonomi;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan. Agenda ini dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi wilayah ;
3. Meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing , yang dititiberatkan pada pemenuhan layanan dasar. Misalnya saja pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dititikberatkan pada peningkatan karakter dan budi pekerti yang baik membangun etos kerja;
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Merujuk pada agenda prioritas pembangunan nasional, khususnya *“memperkuat stabilitas polhukham dan transformasi pelayanan publik”*, tujuan yang akan dicapai oleh kementerian komunikasi dan publik, tujuan yang akan dicapai oleh kementerian komunikasi dan informatika, badan siber dan sandi nasional serta badan pusat statistik dalam periode lima tahun kedepan adalah *“terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral”* untuk aparat sipil negara, kelembagaan dan proses bisnis dan proses bisnis organisasi serta akuntabilitas kinerja dan pengawasan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, antara lain dilakukan dengan strategi penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penerapan spbe terintegrasi.

Pengembangan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan

Diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, terlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi.

3.2 Program dan Kegiatan

Berdasarkan permendagri ri nomor 90 tahun 2019 tentang peraturan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maka program dan kegiatan yang ada di dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025, yaitu:

A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - a Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd
 - b Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd
 - c Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan dpa-skpd
 - d Penyusunan dokumen perencanaan
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a Penyediaan gaji dan tunjangan asn
 - b Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn
 - c Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd
 - d Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran skpd
 - e Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
 - b Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - c Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a Penyediaan bahan logistik kantor
- b Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan Kantorpenyediaan peralatan rumah tangga
- c Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- d Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd
- 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a Pengadaan saeara dan prasarana gedung kantor dan bangunan Lainnya
- 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a Penyediaan jasa komunikasi,sumbrer daya air dan listrik
- 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a Penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - c Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- B PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - 1 Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a Layanan hubungan media
 - b Kemitraan dengan pemangku kepentingan
 - c Penyelenggaraan hubungan masyarakat media kemitraan komunitas
 - d Pengelolaan media komunikasi publik
 - e Pelayanan informasi publik
 - f Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
 - g Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik
- C PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA
 - 1 Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - b Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah
 - c Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis Elektronik
 - d Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah
 - e Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kabupaten/kota cerdas Dan kota cerdas
 - f Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi Dan komunikasi pemerintah daerah
 - g Pengelolaan government chief infirmation officer (gcio)
 - h Monitoring,evaluasi dan pelaporan pengembangan ekosistem spbe
- D PROGRAM STATISTIK SEKTORAL
 - 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan,pengolahan analisis dan Diseminasi data statistik

sektoral

- b Peningkatan kapasitas sdm pemerintah daerah dalam peningkatan Mutu statistik daerah yang terintegrasi
- c Membangun metadata statistik sektoral
- d Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
- e Pengembangan infrastruktur
- f Penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah

E PROGRAM PENYELENGGARAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - b Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
 - c Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/kota
 - d Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya Keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan tersebut kemudian dirumuskan indikator kinerja dan targetnya serta pendanaan indikatif sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Penjabaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KODE				URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA ROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
210				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika								
210	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
210	01	01	2.01	01 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
210	01	01	2.01	03 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Gunung Sugih	1	18.250.000	PAD		1	20.500.000
210	01	01	2.01	06 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Gunung Sugih	0	0	PAD		12	17.750.000
210	01	01	2.01	04 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa- Skpd	Gunung Sugih	1	14.964.000	PAD		1	15.500.000
210	01	01	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Gunung Sugih	1	11.600.000	PAD		1	21.750.000
210	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
210	01	01	2.02	01 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	Gunung Sugih	26	2.551.234.470	PAD		26	2.555.234.470
210	01	01	2.02	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Gunung Sugih	11	1.212.665.000	PAD		11	590.068.000
210	01	01	2.02	05 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Gunung Sugih	1	9.000.000	PAD		1	15.300.000
210	01	01	2.02	07 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Skpd	Gunung Sugih	12	21.570.000	PAD		12	29.710.000
210	01	01	2.02	06 Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Gunung Sugih	0	0	PAD		4	15.750.000
210	01	01	2.03	Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah								
210	01	01	2.03	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Gunung Sugih	0	0	PAD		26	8.000.000

210	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Gunung Sugih	0	0	PAD		26	40.000.000
210	01	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Gunung Sugih	0	0	PAD		26	25.000.000
210	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
210	01	01	2.06	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Gunung Sugih	10	32.196.300	PAD		10	3.250.000
210	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Gunung Sugih	0	0	PAD			4.250.000
210	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Gunung Sugih	15	27.549.200	PAD		15	78.300.700
210	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Gunung Sugih	7	15.945.000	PAD		7	39.662.000
210	01	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Gunung Sugih	75	88.521.000	PAD		75	458.089.000
210	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
210	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Gunung Sugih	0	0	PAD		5	1.050.000.000
210	01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
210	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Gunung Sugih	12	68.400.000	PAD		12	91.500.000
210	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
210	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpelihareanya Kendaraan Dinas	Gunung Sugih	5	188.350.000	PAD		5	215.350.000
210	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Gunung Sugih	7	68.300.000	PAD		7	97.750.500
210	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Gunung Sugih	1	21.186.000	PAD		1	89.818.000
210	01	01	2.15		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
210	01	01	2.15	04	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Social Media	Gunung Sugih	0	0	PAD		4	50.000.000
210	01	01	2.15	05	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pameran Tingkat Provinsi	Gunung Sugih	0	0	PAD		1	440.071.900
210	01	01	2.15	06	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Hubungan Media	Gunung Sugih	425	243.000.000	PAD		425	1.940.119.500
210	01	01	2.15	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Bakohumas	Gunung Sugih	0	0	PAD		43	27.450.000
210	01	01	2.15	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya Ppid	Gunung Sugih	0	0	PAD		43	17.189.000
210	01	01	2.15	02	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Kelompok Informasi Masyarakat	Gunung Sugih	311	40.000.000	PAD		311	260.978.200
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	6	03	2.01	02	Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan Dan	Gunung	0	0	PAD		43	25.570.000

					Domain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Nama Domain Dan SubDomain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Sugih						
2	6	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Gunung Sugih	0	0	PAD		43	35.049.200
					Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								
2	6	03	2.02	01	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Gunung Sugih	0	0	PAD		43	442.980.000
2	6	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah Yang Dikelola	Gunung Sugih	43	1.452.459.047	PAD		43	1.565.190.871
2	6	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	Gunung Sugih	0	0	PAD		1	38.414.600
2	6	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Gunung Sugih	0	0	PAD		1	65.400.000
2	6	03	2.02	09	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas Dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi Yang Diimplementasikan Sesuai Dengan Masterplan Smart City	Gunung Sugih	0	0	PAD		1	53.113.200
2	6	03	2.02	10	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Gunung Sugih	0	0	PAD		1	50.652.000
2	6	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (Gcio)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (Gcio)	Gunung Sugih	0	0	PAD		3	17.100.000
2	6	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem Spbe	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem Spbe	Gunung Sugih	0	0	PAD		12	90.527.500
210	01	01	15		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Dilingkup Daerah Kabupaten/Kota								
210	01	01	15	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Sektoral	Gunung Sugih	1	40.000.000	PAD		1	86.733.000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas Sdm Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi	Gunung Sugih	0	0	PAD		3	37.414.600
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Membangun Metadata Statistik Sektoral	Gunung Sugih	0	0	PAD		1	25.445.500
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Gunung Sugih	0	0	PAD		43	127.280.000
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Terkembangnya Infrastruktur	Gunung Sugih	0	0	PAD		2	26.570.000
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Gunung Sugih	0	0	PAD		2	36.049.200
210	01	01	15		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota								
210	01	01	15	12	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Informasi Pemereintah Daerah	Gunung Sugih	0	0	PAD		43	20.250.000

2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Gunung Sugih	0	0	PAD		1	36.049.200
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah DaerahKabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Untuk Perangkat Daerah DiTingkat Kabupaten/Kota	Gunung Sugih	0	0	PAD		43	28.570.00

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program dinas komunikasi informatika dan statistik tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

TABEL 4.1

RUMUSAN RENCANA KERJA PERUBAHAN PROGRAM DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK TAHUN 2025

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6
210					Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika				
210	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
210	01	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
210	01	01	2.01	03	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Jumlah Dokumen Rka-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Rka-Skpd	Lampung Tengah	1	18.250.000
210	01	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.01	04	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	Jumlah Dokumen Perubahan Dpa-Skpd Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Dpa-Skpd	Lampung Tengah	1	14.964.000
210	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
210	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	Lampung Tengah	26	2.768.986.000
210	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Lampung Tengah	11	1.212.665.000
210	01	01	2.02	05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd Dan Laporan	Lampung Tengah	1	9.000.000

						Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Skpd			
210	01	01	2.02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Skpd	Lampung Tengah	12	21.570.0000
210	01	01	2.02	06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.03		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
210	01	01	2.03		Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.05	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
210	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Lampung Tengah	32	27.549.000
210	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	Lampung Tengah	17	15.945.000
210	01	01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Lampung Tengah	50	88.521.000
210	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
210	01	01	2.07	09	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
210	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Lampung Tengah	12	68.400.000
210	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
210	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpelihareanya Kendaraan Dinas	Lampung Tengah	5	188.350.000
210	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Lampung Tengah	34	68.300.000
210	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	Lampung Tengah	1	21.186.000
210	01	01	2.15		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
210	01	01	2.15	04	Pengelolaan Konten Dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Tersedianya Social Media	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.15	05	Pelayanan Informasi Publik	Terselenggaranya Pameran Tingkat Provinsi	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.15	06	Layanan Hubungan Media	Terselenggaranya Hubungan Media	Lampung	425	1.716.000.000

							Tengah		
210	01	01	2.15	08	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Terselenggaranya Bakohumas	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.15	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terselenggaranya PPID	Lampung Tengah	0	0
210	01	01	2.15	02	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media Dan Kemitraan Komunitas	Terselenggaranya Kelompok Informasi Masyarakat	Lampung Tengah	311	40.000.000
2	6	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan SubDomain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	6	03	2.01	02	Penatalaksanaan Dan Pengawasan NamaDomain Dan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan Dan Pengawasan Nama Domain DanSub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	0	0
2	6	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Lampung Tengah	0	0
					Pengelolaan E-Government Di LingkupPemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	6	03	2.02	01	Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-GovernmentDalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan Dan Pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Lampung Tengah	0	0
2	6	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah Yang Dikelola	Lampung Tengah	1	1.716.000.000
2	6	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi Dan Proses BisnisPemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Lampung Tengah	0	0
2	6	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung LayananPemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Lampung Tengah	0	0
2	6	03	2.02	09	Pengembangan Dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Terlaksananya Program inovasi Yang Diimplementasikan SesuaiDengan Masterplan Smart City	Lampung Tengah	0	0
2	6	03	2.02	10	Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi Dan KomunikasiPemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber DayaTeknologi Informasi Dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Lampung Tengah	0	0
2	6	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (Gcio)	Terlaksananya Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Lampung Tengah	0	0
2	6	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi Dan PelaporanPengembangan Ekosistem Spbe	Terlaksananya Monitoring, EvaluasiDan Pelaporan Pengembangan Ekosistem Spbe	Lampung Tengah	0	0
210	1	01	15		Penyelenggaraan Statistik Sektoral DlingkupDaerah Kabupaten/Kota				
210	01	01	15	01	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan,Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Tersedianya Data Sektoral	Lampung Tengah	43 Pd	40.000.000
2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Sdm Pemerintah DaerahDalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Yang Terintegrasi		Lampung Tengah	0	0
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Terbangunnya Membangun Metadata Statistik Sektoral	Lampung Tengah	0	0
2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan StatistikSectoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sectoral	Lampung Tengah	0	0
2	20	02	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Terkembangnya Infrastruktur	Lampung	0	0

							Tengah		
2	20	02	2.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral Di Daerah	Lampung Tengah	0	0
210	1	01	15		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
210	01	01	15	12	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Informasi Pemereintah Daerah	Lampung Tengah	0	0
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis ElektronikDan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berabasis Elektronik Dan Non Elektronik	Lampung Tengah	0	0
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan InformasiPemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Untuk Perangkat Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota	Lampung Tengah	0	0

BAB V

PENUTUP

Renja perangkat daerah tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode tahun 2025. Dokumen ini disusun berpedoman pada dokumen rencana strategis dians komunikasi informatika dan statistik tahun 2021-2026 dan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten lampung tengah tahun 2021-2026.

Renja perangkat daerah tahun 2025 akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rka perangkat daerah tahun 2025. Selain itu, renja perubahan perangkat daerah tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil renja perangkat daerah tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan.

Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, kepala daerah akan melakukan tindakan penyesuaian.

**Kepala Dinas Kominfotik
Kabupaten Lampung Tengah**



EDI SUPENA, S.Sos., M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197501112000031009